

**PETUGAS PERTAPAAAN PADA MASA BALI KUNO BERDASARKAN
PRASASTI ABAD KE-9 SAMPAI 12 MASEHI**
*Hermitage Custodian in Ancient Bali Period from 9th to 12th Century Based on
Inscription*

Ni Made Dewi Wahyuni

Alumni Program Studi Arkeologi
Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana
Jl. Pulau Nias No. 13, Denpasar 80114
Email: dewipingpong@gmail.com

Naskah diterima: 04-08-2015; direvisi: 22-09-2015; disetujui: 22-03-2016

Abstract

Inscription is one of written sources about religious life of people in the past. In the inscription from ancient Bali period between the 9th to 12th century AD, it was mentioned the term 'hermitage' which used to build self spirituality. This research aims to know what hermitage servants are and their roles based on ancient Bali inscription in 9th to 12th century. The data, both primary and secondary, were collected through literature study. The result is inscription data from 9 to 12th century and artifact evidences in the form of hermitage building. Based on that data it is know that hermitage servants at the time is called 'samgat wilang patapan' and 'samgat tapa haji', who was responsible to build hermitage, collect tax, maintain and care for the hermitage.

Keywords: old bali, hermitage, servants, role.

Abstrak

Prasasti merupakan salah satu sumber tertulis mengenai kehidupan religius masyarakat masa lalu. Pada prasasti masa Bali Kuno abad ke-9 sampai 12 Masehi terdapat penyebutan pertapaan, yang dimanfaatkan untuk membina spiritualitas diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui petugas pertapaan dan perannya berdasarkan prasasti Bali Kuno abad ke-9 sampai 12 Masehi, yang data-datanya baik primer maupun sekunder, diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini berupa data-data prasasti abad ke-9 sampai 12 Masehi, dan bukti-bukti artefaktual berupa bangunan pertapaan pada masa tersebut. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa petugas pertapaan pada masa itu disebut sebagai samgat wilang patapan dan samgat tapa haji, yang bertugas membangun pertapaan, pemungut/pengumpul pajak, menjaga, dan merawat bangunan pertapaan.

Kata kunci: bali kuno, pertapaan, petugas, peran.

PENDAHULUAN

Prasasti adalah suatu putusan resmi, tertulis di atas batu atau logam, dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, yang memuat keterangan berupa anugerah dan hak yang dikaruniakan dengan beberapa upacara (Bakker 1972, 10). Prasasti sebagai salah satu sumber sejarah yang di antaranya memuat juga perkembangan religi di Bali. Dalam aspek religi, prasasti biasanya menyebutkan tentang

kekuatan kosmos yang diberi nama sebagai pribadi-pribadi, baik yang dikenal sebagai nama dewa-dewa Hindu maupun kekuatan-kekuatan semesta lain yang tampaknya mengacu kepada kepercayaan setempat, baik makhluk halus maupun arwah nenek moyang. Keterangan ini sebagai saksi dan sekaligus diharapkan akan memberi kutukan atau hukuman kepada siapa saja yang melanggar ketentuan dalam prasasti tersebut (Setiawan 2008, 53). Masyarakat

masa lalu dengan kepercayaan yang dianutnya cenderung berusaha untuk mengungkapkan dan menghadirkan berbagai simbol untuk memperkuat keyakinan atas kepercayaannya agar kekuatan semesta yang berasal dari dewa-dewa, makhluk halus, ataupun arwah nenek moyang yang dipercayai tersebut memiliki *sthana*. Hal ini dipercaya dapat memberikan keselamatan, ketenteraman, dan kesejahteraan bagi masyarakat pendukungnya. Konsep inilah yang menyebabkan timbulnya sifat sakral bagi sebagian besar bangunan peninggalan masa lalu. Bangunan peninggalan masa lalu di Bali sebagian besar merupakan *living monument*.

Kepercayaan Hindu yang tumbuh dan berkembang di Bali semakin memperkokoh eksistensi bangunan peninggalan tersebut. Bangunan peninggalan masa lalu yang ditemukan di Bali diantaranya yakni candi (*prasada*), pura, goa dan ceruk pertapaan. Bangunan candi misalnya Candi Gunung Kawi, Candi Kerobokan, Candi Pegulingan, dan Candi Buddha Kalibukbuk. Goa atau ceruk pertapaan misalnya ceruk pertapaan di Candi Gunung Kawi, serta goa dan ceruk pertapaan di Goa Gajah. Penelitian ini terkait pada petugas pertapaan yang disebutkan pada prasasti-prasasti di Bali, sebelumnya perlu dijelaskan secara singkat mengenai pertapaan terlebih dahulu. Secara umum pertapaan merupakan tempat untuk bertapa. Bangunan pertapaan tersebut cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat memberikan gambaran mengenai sejarah kehidupan masa lalu mengingat keberadaannya yang berdekatan dengan bangunan-bangunan arkeologis dan tidak jarang juga termuat dalam peninggalan prasasti yang ditemukan. Prasasti pada masa Bali Kuno seringkali menyebutkan selain pendeta istana yang tinggal di pusat pemerintahan, ada pula pemuka agama yang tinggal jauh dari keramaian, yaitu di lingkungan pertapaan-pertapaan (gambar 1).

Pertapaan sebagai bangunan suci yang sangat berperan pada masa lalu dapat dilihat dari kutipan-kutipan di dalam prasasti. Terdapat



Gambar 1. Ceruk di Goa Garbha.
(Sumber: Dokumen Pribadi)

16 prasasti dari abad ke-9 sampai 12 Masehi di Bali yang menyebutkan tentang pertapaan. Penyebutan pertapaan di Bali tidak selalu sama dalam setiap prasasti tersebut. Pertapaan merupakan tempat untuk mengasingkan diri di tempat sepi untuk beberapa lama hingga tercapainya tujuan yang diinginkan oleh para petapa. Prasasti seringkali menyebutkan para pendeta yang bertugas pada suatu daerah pertapaan, misalnya saja pendeta di *Antakunjarapada*, tempat yang dimaksud yakni di Goa Gajah. Organisasi keagamaan di tingkat pertapaan yang dimuat di dalam prasasti yang dikeluarkan oleh raja mengindikasikan adanya kemungkinan pengaturan oleh pemerintah pusat. Bangunan pertapaan biasanya merupakan tempat tinggal para *wiku* yang ditugaskan oleh raja atau yang mengundurkan diri dari keramaian dan tinggal menjadi petapa (Munandar *et al.* 2012, 76-77). Pelaksanaan kehidupan bertapa pada tahapan kehidupan dibuktikan dengan terbacanya *bangunĕn partapānan*, *wangunan partapanān*, *patapān*, *patapānan* dan *katyagan* dalam beberapa prasasti. Sebagai contoh dalam prasasti bernomor 001 Sukawana A1 tahun 804 *Śaka* (882 Masehi) menyebutkan “...*bangunĕn partapānan satra di katahan buru...*”, menurut para ahli epigrafi pertapaan tersebut terletak di Bukit Kintamani. Selain dibuktikan dengan *partapānan* dan *patapānan* dalam prasasti, juga ditemukannya tinggalan arkeologis berupa

ceruk-ceruk pertapaan yang banyak tersebar di sepanjang Sungai Pakerisan dan Petanu (Setiawan 2008, 55-56).

Penyebutan daerah pertapaan dalam prasasti seringkali diikuti dengan penyebutan petugas pada pertapaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana penyebutan petugas di pertapaan dan apa tugasnya di pertapaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan kedua permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri secara mendalam mengenai proses-proses budaya dan tata cara kehidupan masyarakat yang terjadi pada masa lampau terutama yang dibahas di dalam prasasti dan juga untuk memahami dan merekonstruksi kehidupan religi masyarakat Bali Kuno yang dicerminkan melalui bangunan peninggalan berupa pertapaan. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan sejarah pertapaan yang ada di Bali, agar dapat menjadi acuan berpikir serta bertingkah laku bagi masyarakat masa kini serta memberikan informasi penting terkait pertapaan berdasarkan prasasti pada masa Bali Kuno kepada pemerintah, instansi-instansi terkait, masyarakat Bali khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu diharapkan juga agar hasil penelitian ini dapat merangsang tindakan pelestarian terhadap objek pada penelitian ini khususnya dan peninggalan arkeologi yang ada di Bali pada umumnya.

Berdasarkan tinjauan beberapa pustaka yang erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu: (1) hasil penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh A.A. Gede Bagus tahun 1986 yang berjudul “Beberapa Pertapaan di Sepanjang Sungai Pakerisan di Kabupaten Gianyar” membahas mengenai bentuk pertapaan, yakni berbentuk goa, berbentuk serambi dengan tiang, menyerupai bentuk rumah, dan berbentuk rumah, serta landasan konsepsi masyarakat Bali Kuno untuk membuat pertapaan pada

tebing-tebing sungai yang dilandasi adanya konsepsi *tirtha*. (2) Penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Ni Wayan Sudiani tahun 1996 yang berjudul “Tipe Ceruk pada Kompleks Candi Gunung Kawi Gianyar (Suatu Kajian Arsitektur)” membahas mengenai bentuk-bentuk ceruk pertapaan yang terdapat di kompleks Candi Gunung Kawi Gianyar. (3) Ida Bagus Weda Mahendra (1984) dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan dan peranan tokoh agama pada Abad ke-9 sampai 11 di Bali”, membahas tentang kedudukan serta peranan tokoh agama sejak zaman pemerintahan Raja Sri Kesari Warmadewa hingga Raja Anak Wungsu. (4) Artikel yang ditulis oleh I Gusti Made Suarbhawa dalam *Forum Arkeologi* Seri Penerbitan No. II Oktober 2007 membahas mengenai Patapan Langgaran yang terdapat di dalam Prasasti Langgahan yang ditemukan di Kintamani, Bangli. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja Bali Kuno terakhir yakni Paduka Sri Astāsura Ratnabhumibanten pada tahun 1259 *Śaka*, menyebutkan tentang istilah *Patapan Langgaran* yang menguraikan batas-batas pertapaan yang ditulis secara lengkap dan rinci beserta hubungannya dengan daerah di sekitarnya. Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian sejenis sebelumnya yakni penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai bentuk-bentuk pertapaan di sepanjang Sungai Pakerisan beserta konsep dasar pembangunannya, bentuk pertapaan yang mengkhusus di Gunung Kawi, tokoh-tokoh agama yang berperan pada abad ke-9 sampai 12 Masehi di Bali serta batas dan fungsi pertapaan di salah satu lokasi, sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada petugas-petugas yang bertugas di pertapaan berdasarkan informasi yang didapatkan pada prasasti-prasasti yang terbit pada abad ke-9 sampai 12 Masehi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari skripsi Ni Made Dewi Wahyuni (2015) yang berjudul *Pertapaan Pada Masa Bali Kuno Abad ke-9 sampai 12 Masehi*.

METODE

Lokasi penelitian yang akan dilakukan tidak langsung pada lokasi prasasti tersebut berada, karena pada penelitian ini secara garis besar menggunakan data hasil dari transliterasi sebuah prasasti yang sudah dirangkum dan diterbitkan oleh para peneliti sebelumnya. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh serta mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama yang ditemukan di lapangan sesuai dengan objek penelitian yakni berupa bukti-bukti artefaktual bangunan pertapaan termasuk hasil wawancara. Data Sekunder merupakan data penunjang yang digunakan untuk mendukung pemecahan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa prasasti-prasasti pada abad ke-9 sampai 12 Masehi di Bali yang memuat informasi tentang pertapaan dan telah dialih aksara ke dalam bentuk buku, jurnal, dan pustaka lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung di situs-situs bangunan pertapaan, wawancara, dan studi kepustakaan. Pengamatan langsung di lapangan disertai dengan kegiatan pencatatan, penggambaran, dan pemotretan terhadap objek yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu pertapaan. Wawancara dilaksanakan melalui metode wawancara tanpa struktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang dipusatkan pada permasalahan penelitian (Koentjaraningrat 1983a, 162-194). Wawancara dilakukan terhadap beberapa ahli prasasti dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai prasasti-prasasti terkait. Analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, dari observasi, dan bahan-bahan lain sehingga peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis dilakukan secara kualitatif, melalui penjelasan dalam bentuk kata-kata yang tersusun dalam teks yang diperluas disertai eksplanasi mengenai hubungan antara teks prasasti dengan objek penelitian, kemudian diakhiri dengan penyimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Birokrasi Pemerintahan

Penggolongan tugas bagi seseorang seringkali dikaitkan dengan jabatan yang telah disandanginya. Pembicaraan mengenai jabatan erat hubungannya dengan struktur pemerintahan dan birokrasi yang sedang berjalan. Pada zaman Bali Kuno struktur pemerintahan terdiri atas jabatan-jabatan tingkat pusat, tingkat menengah dan tingkat bawah (Astra 1977, 145). Pada masa Bali Kuno, petugas pertapaan termasuk ke dalam struktur birokrasi yang di dalamnya telah memiliki hierarki, dengan nama seperti *senāpati*, *samgat*, dan *dang ācāryya*. Secara umum, jabatan *samgat* ini termasuk ke dalam jabatan pemerintah pusat. Tingkatan dalam struktur pemerintah pusat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada posisi pertama diduduki oleh raja yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Selain raja juga ada beberapa kerabat dekat raja seperti sanak saudara beliau dan didukung oleh para pendeta. Lapisan kedua diduduki oleh para bangsawan yang terdiri atas orang-orang ahli dalam pemerintahan, tata negara, hukum, dan keprajuritan. Orang-orang tersebut bergelar *senāpati* dan *samgat*. Pejabat-pejabat tersebut bernaung dalam suatu lembaga yang disebut *panglapuan*, *pasakmasan*, *palapknan*, dan *samohanda*. Kemudian, sejak Raja Udayana berkuasa lembaga itu disebut "*pakira-kiran i jro makabehan*". Pada zaman berikutnya kedudukan para pendeta (*dang acaryya*) baik dari pendeta Siwa maupun Buddha, berada atau menduduki lapisan kedua ini disamping lapisan kekuasaan pertama. Sehingga lembaga tersebut pada zaman itu beranggotakan para *senāpati*, *samgat*, dan *dang ācāryya*. Lapisan ketiga diduduki oleh para pegawai kerajaan. Mereka diberikan gaji oleh raja dan bertanggungjawab kepada para pejabat yang menduduki jabatan di *pakira-kiran i jro makabehan* atau langsung kepada raja. Ruang lingkup kekuasaannya hanya mencakup salah satu bidang tertentu dalam kehidupan masyarakat. Pegawai tersebut

antara lain yaitu *caksu*, *nayaka*, *pasukganti*, *pamudi*, *banjar*, *panulisan*, dan *manuratang*, *juru gosali*, *mabwathaji*, *kabayan*, *hulu*, *adhikara*, *tuha*, *ser*, dan *pakaser*. Lapisan keempat diduduki oleh para *rama* atau kepala desa. Ruang lingkup kekuasaannya hanya sebatas wilayah desanya atau *wanua/banua*. Lapisan ini difungsikan sebagai lapisan perantara, yakni antara ketiga lapisan sebelumnya dengan rakyat atau penduduk di desanya. Lapisan kelima diduduki oleh para tukang, petani dan buruh tani, pada masa Bali Kuno disebut *anak wanua* dan *anak thani*. Lapisan terbawah dan terakhir terdiri atas para budak yang disebut *hulun*. Kadangkala para *hulun* itu nilainya disamakan dengan benda mati dan dapat dipakai sebagai alat tukar atau alat beli, bahkan sebagai barang jaminan pengganti suatu benda (Astra 1997, 229-338).

Nama pejabat kerajaan banyak disebutkan dalam prasasti-prasasti pada masa Bali Kuno misalnya *nayaka*, *samgat*, *senapati*, dan lainnya. Mereka menduduki suatu jabatan dengan tugas tertentu pada suatu bidang atau wilayah tertentu pula. Pejabat-pejabat tersebut merupakan seperangkat fungsi pemerintahan yang satu sama lain saling berhubungan secara struktural fungsional atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan kerajaan. Salah satu jabatan pada masa Bali Kuno yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *samgat*.

Samgat merupakan akronim dari kata *sang pamgat* yang berarti sang pemutus. Kata *pamgat* berasal dari kata *pgat* yang berarti putus (Astra 1977, 159). Kelompok *samgat* pada awalnya merupakan jabatan pemerintahan di tingkat pusat. Jabatan tingkat pusat adalah jabatan yang wewenang tugasnya meliputi seluruh wilayah kerajaan. Jabatan ini juga merupakan suatu badan penasihat pusat yang bertugas membantu raja dalam berbagai bidang pemerintahan. Jabatan tingkat pusat merupakan golongan pejabat yang berada di lapisan kekuasaan kedua pada sistem pemerintahan masa Bali Kuno (Parwati 1990, 30-42).

Pada masa selanjutnya jabatan kelompok *samgat* berkembang juga pada pemerintah tingkat daerah. Jabatan pemerintah tingkat daerah merupakan jabatan yang pejabatnya berwenang dalam urusan suatu persoalan yang menyangkut wilayah lebih dari satu desa atau dapat juga mengatur suatu pemerintahan tingkat desa. Sebagian besar dari pejabat-pejabat yang disebutkan dalam prasasti Bali Kuno abad ke-9 sampai 11 digolongkan ke dalam kelompok ini. Pejabat-pejabat dalam kelompok ini bertanggungjawab langsung kepada *tanda rakryan* (*senapati*) yang berkedudukan di pusat (Parwati 1990, 43-46). Para *samgat* menerima perintah raja yang disampaikan oleh *senapati*. Hal itu menunjukkan bahwa kedudukan para *samgat* sebagai kelompok penguasa dalam bidang pemerintahan (*the ruling class*) berada setingkat di bawah *senapati*. Goris berpendapat bahwa susunan jabatan-jabatan di bawah *senapati* pada masa Bali Kuno secara hierarkis dari atas ke bawah terdiri atas (1) *samgat*, (2) *ser*, (3) *nayaka*, (4) *caksu*, (5) *sahaya*, (6) *juru*, (7) *hulu*, dan (8) *tuha* (Goris 1971, 24-25).

Golongan *samgat* ini pertama kali terbaca dalam prasasti pada zaman Raja Tabanendra (877 *Śaka*) disebutkan sebagai *samgat juru mangjahit kajang*. Setelah itu penggunaan jabatan *samgat* tidak lagi ditemukan, hingga pada zaman Raja Udayana penyebutan *samgat* muncul kembali dengan golongan-golongan tertentu. Penggolongan tertentu untuk penyebutan *samgat* dilakukan berdasarkan ranah keahliannya masing-masing. Contohnya pada masa Raja Udayana disebutkan salah satu golongan yakni *samgat mañuratang ajña* yang berarti pejabat yang bertugas dalam bidang tulis menulis di kerajaan atau dalam istilah kekinian dikenal dengan nama kesekretariatan atau sekretaris.

Petugas Pertapaan

Berdasarkan 16 alih aksara teks prasasti ke-9 sampai 12 Masehi yang menyebutkan tentang pertapaan (tabel 1), terdapat keterangan

Tabel 1. Daftar prasasti yang dianalisis.

No.	No.	Tahun	Nama Prasasti	Periode (Nama Raja)	Nama Pertapaan yang disebutkan	Petugas Pertapaan yang disebutkan
1	001	804 Śaka (882 Masehi)	Sukawana A1	-	<i>partapanān satra di katahan buru</i>	-
2	003	813 Śaka (901 Masehi)	Trunyan A1	-	<i>patapān songan</i>	-
3	005	Tanpa angka tahun	Bangli, Pura Kehen	-	<i>Partapanān di hyang karimama</i>	-
4	102	839 Śaka (917 Masehi)	Babahan I	Raja Ugrasena	<i>Partapanan dahulun bukit di ptung</i>	-
5	-	888 Śaka (966 Masehi)	Serai AI	Raja Ugrasena	-	-
6	110	Tanpa angka tahun	Gobleg, Pura Batur A	Raja Ugrasena	<i>di partapanañña ditu</i>	-
7	209	897 Śaka (975 Masehi)	Sembiran AII	Raja Janasadu Warmadewa	<i>partapanan di dharmmakuta</i>	-
8	302	915 Śaka (993 Masehi)	Serai AII	Raja Udayana	-	<i>samgat tapa haji giṅangça</i>
9	-	944 Śaka (1022 Masehi)	Batuan	Raja Marakata	-	<i>Samgat wilang patapan</i>
10	353b	945 Śaka (1023 Masehi)	Tengkulak A	Raja Marakata	<i>katyagan ing pakrisan mangaran ringamarawati</i>	-
11	441	995 Śaka (1073 Masehi)	Sawan AII = Bila AII	Raja Anak Wungsu	(terdapat kata <i>patapān</i>)	-
12	-	Tanpa angka tahun	Manik Liu AII	-	(terdapat kata <i>partapān</i>)	-
13	-	1040 Śaka (1118 Masehi)	Tamblingan Pura Endek IV	-	(terdapat kata <i>partapān</i>)	-
14	642	Tanpa angka tahun	Tengkulak E	Raja Jayapangus	(terdapat kata <i>patapān</i>)	-
15	626	Tanpa angka tahun	Daya	Raja Jayapangus	(terdapat kata <i>partapānan</i>)	-
16	636C	Tanpa angka tahun	Bengkala	Raja Jayapangus	(terdapat kata <i>patapān</i>)	-

(Sumber: edit pribadi)

pada dua prasasti yang menyebutkan tentang jabatan petugas pada daerah pertapaan. Hasil analisis bersifat sementara, karena dapat berubah seiring dengan bertambahnya informasi dan cara pandang penulis pada penelitian selanjutnya. Jabatan petugas pada daerah pertapaan berdasarkan analisis data prasasti adalah sebagai berikut.

Data di atas menunjukkan bahwa pertapaan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Bali Kuno sehingga seringkali keberadaan pertapaan dimuat dalam prasasti yang dikeluarkan oleh raja Bali Kuno pada masa pemerintahannya. Berdasarkan tabel di atas hanya terdapat dua prasasti menyebutkan petugas pertapaan. Prasasti lainnya yang tercantum sebagai data di atas dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai peran dan tugas yang dilakukan oleh petugas pertapaan tersebut.

Samgat Tapa Haji

Penyebutan petugas pertapaan dengan sebutan *samgat tapa haji* ditemukan pada prasasti Serai AII yang dikeluarkan oleh Raja Udayana dan berangka tahun 915 Śaka (993 Masehi). Adapun kutipan prasastinya sebagai berikut.

Va. 2. “*lula tuha guṇo, samgat tapa haji giṅangça, samgat mañuratang ājña katlu mañjapara, dinākara surendra samgat adhikāraṇa kranta pamas, samgat adhikā...*” (Goris 1954a, 82-83).

Artinya,

Va. 2. “(Ka)lula adalah Tuha Gano, samgat Tapahaji adalah Ginangsa, samgat juru tulis perintah raja jumlahnya tiga orang yaitu Manjapura, Dinakara, dan Surendra. Samgat Adhikaranakranta adalah Pamas, samgat Adhika...” (Ardika dan Beratha 1996, 135).

Prasasti Serai AII menguraikan tentang kewajiban-kewajiban yang dibayarkan oleh masyarakat di sekitar tempat perburuan raja yang terlalu tinggi, kemudian masyarakat memohon kepada raja suami istri untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Raja mengabulkan permohonan masyarakat dan menganugerahkan prasasti agar dapat selalu dijaga dan ditaati. Salah satu saksi dalam penganugrahan prasasti tersebut adalah *samgat tapa haji* yang bernama Ginangsa. *Samgat tapa haji* dapat diartikan sebagai petugas yang bertanggung jawab atas tempat-tempat pertapaan raja. Daerah yang dianugerahkan prasasti ini diperbolehkan untuk membangun pertapaan dan batas-batasnya pun disesuaikan dengan daerah wilayah perburuan raja. *Samgat tapa haji* dalam hal ini merupakan pejabat kerajaan di tingkat pusat yang bertanggung jawab atas tempat pertapaan milik raja. *Samgat tapa haji* dapat disebut sebagai kepala dinas provinsi jika disetarakan dengan sistem pemerintahan pada masa kini, maka dari itu dalam penganugrahan prasasti yang memuat tentang pembangunan pertapaan, pejabat ini dilibatkan sebagai saksi.

Samgat Wilang Patapan

Penyebutan petugas pertapaan dengan sebutan *samgat wilang patapan* ditemukan pada prasasti Batuan yang dikeluarkan oleh Raja Marakata dan berangka tahun 944 Śaka (1022 Masehi). Adapun kutipan prasastinya sebagai berikut.

- Iib. 1. “*Nāyaka sakṣi, mwang sawung tanggun, tan knana minta pamli, ring magha mahānāwami, patapānya maka limang patapan, tkap samgat wilang patapan, tuhun maweha pa*
 2. *kuwuh sā 3 puspusan sā 3 pacaksu sā 3 angkēn tahun juga ya, tan kna pabharu, pawaruga, tan pamwātakna tukuban i samgat wilang patapan, yan ha*
 3. *na amahēt ring patapan, kunang yan hanāgaṅding, aboñjing, amukul, masuling, manngahana ya parmāsan i*

nāyakanya, nguniweḥ yan krangan mu...”
 (Goris 1954a, 97)

Artinya,

- Iib. 1) “Nayaka Saksi, dan Sawung Tanggur. Tidak dikenai pajak pembelian pada bulan Magha dihari kesembilan, pada kelima pertapaannya oleh Samgat tiap-tiap pertapaan. Tetapi mereka memberi
 2) pajak pakuwuh 3 saga, puspusan 3 saga, pacaksu 3 saga setiap tahun, tidak dikenakan pajak pabharu, pajak pawaruga, tidak harus membawa atap kepada Samgat Wilang Patapan. Jika
 3) ada yang memahat di pertapaan, adapun jika penyanyi, pemain angklung, penabuh gamelan, peniup seruling, membayar mas kepada pemimpinnya (Nayakan), terutama suami istri...” (Ardika dan Beratha 1996, 64)

Pada prasasti di atas disebutkan bahwa kewajiban-kewajiban yang dibayarkan oleh masyarakat sekitar pertapaan agar diserahkan kepada *samgat wilang patapan*. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa pada masa pemerintahan Raja Marakata sudah terdapat beberapa bangunan pertapaan, kemudian ditugaskan seorang *samgat* pada setiap tempat pertapaan tersebut, oleh karena itu untuk menyebutkan para *samgat* yang ditugaskan pada masing-masing tempat pertapaan digunakanlah istilah *samgat wilang patapan*. Berdasarkan analisis, kedudukan *samgat wilang patapan* dalam birokrasi pemerintahan kerajaan Bali Kuno termasuk pada jabatan-jabatan pemerintahan di tingkat daerah. Penggolongan *samgat* yang tergabung dalam jabatan di tingkat daerah adalah berdasarkan ranah keahliannya masing-masing. Kemungkinan *samgat wilang patapan* yang bertugas di tempat pertapaan merupakan orang-orang suci yang sekaligus memberikan pendidikan kerohanian di pertapaan sesuai dengan salah satu fungsi daerah pertapaan yakni sebagai asrama bagi para siswa yang mempelajari ilmu agama dan kerohanian pada masa Bali Kuno.

Peran dan Tugas Petugas Pertapaan

Berdasarkan keterangan dari prasasti dapat diuraikan mengenai peran dan tugas yang dilakukan oleh petugas pertapaan, seperti membangun pertapaan, memungut pajak, dan menjaga dan merawat bangunan pertapaan. Berikut masing-masing penjelasan dan analisis dari peran dan tugas tersebut.

Membangun Pertapaan

Tugas dari petugas pertapaan yang dijumpai dalam prasasti adalah tugas untuk membangun pertapaan. Seperti yang telah disinggung bahwa pembangunan tempat pertapaan dimuat dalam prasasti Sukawana AI sekitar akhir abad ke-9 Masehi. Adapun kutipan prasasti yang menyatakan pembangunan tempat pertapaan sebagai berikut.

Ib. 2. "...*cintamani mmal, tanyada husir yya anak atar jalan katba kadahulu, tua hetu syuruhku senapāti danda kumpi marodaya me bhikṣu Śiwakangśita, Śiwanirmala, Śiwaprajna, bangunēn partapanān satra di katahan buru, śimayangña hangga tingkad karuh, hangga puhpuhan kadya, hangga rua kangin...*" (Goris 1954a, 53)

Artinya,

Ib. 2. "... Bukit Kintamani, tidak ada pengungsi atau kelompok orang yang lalu lalang naik atau turun bukit, oleh sebab itu perintahku kepada Senapati danda Kumpi Marodaya dan Bhiksu Siwakangśita, Siwanirmala, Siwaprajna agar membangun pertapaan di tempat peristirahatan di tempat perburuan dengan batas-batasnya, di sebelah barat Tingkad, di sebelah utara Puhpuhan, di sebelah timur jurang..." (Ardika dan Beratha 1996, 42)

Pada prasasti Sukawana AI dijelaskan bahwa raja melalui senapatinya memerintahkan tiga orang bhiksu untuk membangun pertapaan di tempat peristirahatan di sekitar daerah perburuan raja. Adapun batas-batasnya telah ditentukan secara pasti dalam prasasti tersebut. Hanya saja untuk menentukan lokasi tersebut

pada masa ini belum ditemukan. Selain perintah kepada para pejabat untuk membangun pertapaan pada bagian selanjutnya prasasti tersebut juga memuat tentang kewajiban dan aturan-aturan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat yang dianugrahi prasasti. Data mengenai tugas untuk melakukan pembangunan pertapaan juga disebutkan dalam prasasti Serai AI dan AII.

Pembangunan bangunan suci menurut agama Hindu tidak sembarang dilakukan. Terdapat konsepsi yang melandasi setiap pembangunan bangunan suci, misalnya dibangun di daerah yang lebih tinggi atau di daerah yang dekat dengan sumber air. Pada masa lalu landasan pembuatan bangunan suci bersumber pada kitab India Kuno yakni *Vatusastra* (kitab tentang arsitektur) atau *Silpasastra* (kitab pegangan Siplin). Bosch dalam Prajudi (1999, 35-37) berpendapat bahwa percandian dan bangunan suci di Indonesia menggunakan kitab *manasara silpasastra* yang berasal dari India Selatan karena memiliki keidentikkan. Kitab ini berisikan patokan pembuatan bangunan suci atau kuil, dan bangunan profan atau bentuk kota, desa, dan benteng-benteng. *Manasara* mengungkapkan pembuatan bangunan suci sebaiknya didirikan di dekat *tirtha* atau sumber air, baik di sungai, terutama dekat pertemuan dua buah sungai, danau atau laut, bahkan apabila diperlukan harus dibuatkan kolam di halaman bangunan suci atau diletakkan jambangan berisi air di dekat gerbang masuk. Selain itu tempat ideal untuk mendirikan bangunan suci adalah di daerah *ksetra* meliputi puncak bukit, di lereng gunung, di hutan dan di lembah (Prajudi 1999, 35-37).

Berdasarkan hal tersebut dan mengkaitkannya dengan penemuan bangunan suci khususnya bangunan pertapaan di Bali yang cenderung ditemukan di daerah tebing-tebing sungai, kemungkinan landasan konsepsi yang digunakan untuk pembangunannya pada masa lalu juga berdasarkan kitab *manasara silpasastra*. Selain itu faktor lain yang

melandasi pemikiran masyarakat Bali Kuna untuk mendirikan bangunan pertapaan pada tebing sungai dan pada lereng gunung yakni berdasarkan kepercayaan masyarakat Bali bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat para dewa dan tenaga-tenaga gaib. Tempat ini merupakan pertemuan antara dunia manusia dengan dewa atau roh. Pembuatan pertapaan di tempat ini dianggap tepat karena dianggap dapat menolak tenaga-tenaga berbahaya karena bertapa itu sendiri berhubungan dengan tenaga gaib (Kempers 1960, 5). Masyarakat Bali juga mempercayai bahwa sering sekali gumpalan-gumpalan jurang yang luar biasa runtuh ke bawah akibat adanya kejadian-kejadian aneh. Tempat runtuhnya itu sangat tepat untuk memahatkan bangunan candi maupun pertapaan (Kempers 1960, 39).

Pemungut/Pengumpul Pajak

Pada zaman dulu pajak merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela, yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Pada perkembangan selanjutnya pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga kerajaan sehingga pajak pada masa kerajaan dimuat pada prasasti-prasasti yang dikeluarkan raja. Besarnya pajak tidak lagi bersifat sukarela melainkan menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib, dan segala ketentuannya ditetapkan oleh raja secara sepihak, besaran tersebut dimuat dalam prasasti sehingga pajak menjadi suatu kewajiban.

Identifikasi terhadap salah satu tugas pejabat di daerah pertapaan sebagai pemungut/pengumpul pajak pada masa Bali Kuno berdasarkan munculnya keterangan pada Prasasti Batuan mengenai suatu pemberian yang harus diberikan oleh masyarakat kepada pertapaan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut. Adapun kutipan prasasti Batuan 944 *Śaka* (1022 Masehi) yang berkaitan dengan pemungutan/pengumpulan pajak untuk pertapaan adalah sebagai berikut.

- IIIb. 1. “*nāyaka sakṣi, mwang sawung tanggun, tan knana minta pamli, ring magha mahānāwami, patapānya maka limang patapan, tkap samgat wilang patapan, tuhun maweha pa*
 2. *kuwuh sā 3 puspusan sā 3 pacaksu sā 3 angkēn tahun juga ya, tan kna pabharu, pawaruga, tan pamwātakna tukuban i samgat wilang patapan, yan ha*
 3. *na amahēt ring patapan, kunang yan hanāgaṅding, aboñjing, amukul, masuling, manngahana ya parmāsan i nāyakanya, nguniweh yan krangan mu...*”
 (Goris 1954a, 97)

Artinya,

1. “Nayaka Saksi, dan Sawung Tanggur. Tidak dikenai pajak pembelian pada bulan Magha pada hari kesembilan, pada kelima pertapaannya oleh Samgat Wilang Patapaan. Tetapi mereka memberi
2. pajak pakuwuh 3 saga, puspusan 3 saga, pacaksu 3 saga setiap tahun, tidak dikenakan pajak pabharu, pajak pawaruga, tidak harus membawa atap kepada Samgat Wilang Patapan. Jika
3. ada yang memahat di pertapaan, adapun jika penyanyi, pemain angklung, penabuh gamelan, peniup seruling, membayar mas kepada pemimpinnya (Nayakan), terutama suami istri...” (Ardika dan Beratha 1996, 64)

Prasasti tersebut memuat kewajiban-kewajiban masyarakat di sekitar pertapaan untuk memberikan beberapa hal yang telah ditentukan jumlahnya dalam prasasti. Kewajiban-kewajiban tersebut diserahkan kepada para *samgat wilang patapan* yang bertugas untuk mengumpulkan pajak-pajak yang diberikan oleh masyarakat untuk disetorkan kepada raja. Berdasarkan hal ini ditemukan bahwa memungut/mengumpulkan pajak juga merupakan tugas dari pejabat yang bertugas di pertapaan.

Menjaga dan Merawat Bangunan Pertapaan

Menjaga dan merawat bangunan

pertapaan merupakan salah satu tugas dari pejabat yang bertugas di tempat pertapaan. Menjaga bangunan pertapaan tidak dilakukan sendiri oleh petugas pertapaan. Masyarakat di sekitar bangunan pertapaan juga wajib melakukan perlindungan terhadap bangunan suci mereka (gambar 2).



Gambar 2. Ceruk di kompleks Candi Gunung Kawi.
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Hal ini termuat dalam prasasti Sembiran AII 897 Śaka (975 Masehi). Adapun kutipannya adalah sebagai berikut:

- Va 5. *“raptengēnya, watu sakasamahangña ulih to wanwa di julah yanada tarahan tumēken twa partapanan di dharmmakuta, kapwa ta ya kasamagrin*
6. *turun tangga saha sañjata, tulungēn to patapan di dharmmakuta, apan yaprasiddha, ryyuryyang sang ratu dharmmadāyadya ditu, kilagiña..”* (Goris 1954a, 78)

Artinya,

- Va 5. ”efisien, batu disediakan oleh penduduk desa di Julah. Jika ada perampok yang datang di pertapaan di Dharmmakuta, semua penduduk
6. harus datang dengan membawa senjata untuk membantu pertapaan di

Dharmmakuta, oleh karena mereka bisa melindungi pertapaan akhirnya raja memberikan hadiah. Hal itu ditetapkan...” (Ardika dan Beratha 1996, 120-121)

Berdasarkan data yang didapatkan pada prasasti Sembiran AII disebutkan bahwa apabila ada perampok yang datang ke pertapaan

di Dharmmakuta maka semua penduduk desa harus datang dengan membawa senjata untuk melindungi daerah pertapaan tersebut. Penjagaan terhadap bangunan pertapaan sudah menjadi kewajiban bagi penduduk desa, dan akan diberikan hadiah oleh raja atas jasa yang dilakukan. Dengan demikian peran serta masyarakat di sekitar daerah pertapaan juga sangat penting untuk menjaga, merawat, dan melindungi bangunan pertapaannya.

Pertapaan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Bali Kuno karena dimuat dalam prasasti yang merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh raja. Berdasarkan data prasasti yang ditemukan selama ini, situs-situs pertapaan sudah mulai dibangun sejak abad ke-9 Masehi di Bali. Kehidupan religi masyarakat Bali Kuno (khususnya Hindu) berhubungan dengan kegiatan bertapa. Bagi seorang siswa

calon kerohanian atau calon pendeta dan umatnya, menurut konsepsi Hindu memiliki kewajiban atau tata tertib untuk mencapai kesempurnaan hidup dan kesucian lahir batin yang berupa kebajikan, keluhuran budi yang disebut Dharma, untuk mencapai kebahagiaan rohani yang abadi dan kebebasan roh dari reinkarnasi yang disebut dengan *Moksa*. *Moksa* dapat ditempuh dengan berbagai cara kebaikan, salah satunya melalui *Catur Asrama*, yang terdiri atas *Brahmacari* yakni masa belajar dan menuntut ilmu, *Grhasta* yakni masa hidup berumah tangga, *Wanaprastha* yakni masa hidup sebagai petapa dan mengasingkan diri dari kesibukan bermasyarakat, dan *Sanyasin* yakni masa hidup yang telah lepas oleh hawa nafsu serta ikatan keduniawian. Masa bertapa (*wanaprastha*) adalah salah satu syarat untuk mencapai kebahagiaan abadi atau yang disebut dengan *Moksa*. Tempat untuk mendirikan pertapaan haruslah pada tempat yang suasananya baik untuk memberikan ketentraman batin, misalnya di puncak-puncak gunung, hutan, tebing-tebing, dan goa.

KESIMPULAN

Aktivitas bertapa pada masa Bali Kuno melatarbelakangi dibangunnya tempat-tempat pertapaan oleh para raja. Tempat bertapa tidak hanya sebagai tempat untuk mengasingkan diri, tetapi telah berkembang menjadi tempat pendidikan religi dan karakter. Asrama ini mencerminkan adanya keterkaitan dengan bidang pendidikan jasmani dan rohani di masa Bali Kuno (abad 10-14 Masehi). Adanya indikasi kuat ditunjukkan oleh Asrama Amarawati (kompleks pertapaan di Candi Gunung Kawi) yang memiliki ceruk-ceruk pertapaan yang cukup kompleks yang mungkin sekali berfungsi sebagai asrama (*pesraman*) yang memiliki organisasi (petugas-petugas) di dalamnya, sebagai tempat membentuk anak didik menjadi generasi yang berkarakter serta cerdas intelektual, cerdas emosional,

serta cerdas spiritual. Sebagai *pesraman* yang di dalamnya terdapat aktivitas belajar dan mengajar, tidak menutup kemungkinan bahwa petugas yang ditugaskan di pertapaan merupakan cendekiawan di bidang rohani. adapun petugas yang disebutkan dalam prasasti Bali Kuno abad ke-9 sampai 12 Masehi adalah *Samgat Tapa Haji* dan *samgat wilang patapan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan dan Sutjiati Beratha. 1996. *Perajin Pada Masa Bali Kuno Abad IX-XI M*. Denpasar: Udayana Press.
- Astra, I Gde Semadi. 1977. "Jaman Pemerintahan Maharaja Jayapangus di Bali." *Skripsi*. Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Udayana. Denpasar-Bali.
- _____. 1997. "Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XII: Sebuah Kajian Epigrafis." *Disertasi*, Program Doktor, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bagus, A.A. Gede. 1986. "Beberapa Pertapaan Di Sepanjang Sungai Pakerisan Kabupaten Gianyar." *Skripsi*. Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Bakker, S.J.W.M. 1972. "*Ilmu Prasasti Indonesia*." Jurusan Sejarah Budaya, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Goris, DR. Roelof. 1954. *Prasasti Bali I*. Bandung: Masa Baru.
- _____. 1971. *Karya Pungutan*. Lembaga Bahasa Nasional Tjbang Singaradja.
- Kempers, A.J. Bernet. 1960. *Bali Purbakala*. Jakarta: PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- _____. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Mahendra, I. B. W. 1984. "Kedudukan dan Peranan Tokoh Agama Pada Abad IX-XI di Bali." *Skripsi*, Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Munandar, Agus Aris, Gusti Gde Ardana, I Wayan Ardika, dan I Wayan Geriya. 2012. *Raja Udayana di Bali (989-1011)*. Denpasar: Udayana Press.

- Parwati, A.A. Ayu Raka. 1990. "Jabatan-Jabatan Pemerintahan Di Tingkat Daerah Pada Zaman Bali Kuno Dalam Periode Abad IX-XI." *Skripsi*, Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Prajudi H., Rahadhian. 1999. "Kajian Tipologi Morfologi Arsitektur Candi di Jawa." *Tesis*. Program Studi Arsitektur Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung.
- Setiawan, I Ketut. 2008. "Mengamati Aktivitas Keagamaan Masyarakat Bali Melalui Tinggalan Arkeologis." Dalam *Pusaka Budaya dan Nilai Religiusitas*, disunting oleh Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 46-58.
- Suarbhawa, I Gusti Made. 2000. "Teknik Analisis Prasasti". *Forum Arkeologi* No. II (Agustus): 135-147.
- Sudiani, Ni Wayan. 1996. "Tipe Ceruk Pada Kompleks Candi Gunung Kawi Gianyar (Suatu Kajian Arsitektur)". *Skripsi*, Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.
- Wahyuni, Ni Made Dewi. 2015. Pertapaan Pada Masa Bali Kuno Abad IX - XII Masehi. *Skripsi*, Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.